



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DI
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTANTAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai bagian wilayah dari Daerah yang berkedudukan sebagai Perangkat Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Alokasi Dana Desa selama satu periode anggaran.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan.
17. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan pengawasan ADD.

BAB III PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 4

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 5

- (1) Mekanisme penganggaran ADD mengikuti ketentuan penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) ADD dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Rincian ADD setiap Desa Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi formula.
- (2) ADD tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 55.265.562.400 (lima puluh lima miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (3) Besaran alokasi dasar ADD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a sebesar 90 % dari total ADD tahun anggaran 2019 yaitu Rp.49.739.006.160 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ribu seratus enam puluh rupiah).
- (4) Besaran alokasi formula ADD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b sebesar 10 % dari total ADD tahun anggaran 2019 yaitu Rp. 5.526.556.240 (lima milyar lima ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi dasar masing-masing Desa dihitung berdasarkan jumlah alokasi dasar ADD dibagi 153 (seratus lima puluh tiga) Desa.
- (2) Besaran alokasi formula masing-masing Desa dihitung berdasarkan jumlah alokasi formula ADD dibagi 153 (seratus lima puluh tiga) Desa.
- (3) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (4) Masing-masing Desa mendapatkan besaran dana yang merupakan penjumlahan alokasi dasar dan alokasi formula.

Pasal 8

- (1) Besaran Alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 25% (dua puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$AF \text{ Desa} = (0,25 * Z1) + (0,25 * Z2) + (0,25 * Z3) + (0,25 * Z4) * AF \text{ ADD}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se-Daerah
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa se-Daerah.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa se-Daerah.
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Desa di Daerah.
- AF ADD = Alokasi Formula ADD .

BAB IV PENYALURAN ADD

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen);
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Dinas melalui Camat.
- (4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADD Tahap I paling sedikit 85% dan capaian output paling sedikit 75%.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan surat pertanggungjawaban.
- (6) Pagu alokasi dan penyaluran ADD setiap Desa tahun anggaran 2019 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENATAUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Kaur keuangan melakukan pembayaran atas belanja pegawai paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.
- (2) Pembayaran atas belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penyaluran ADD tahap I.
- (3) Dalam hal penyaluran ADD tahap I melewati bulan Januari tahun berjalan, pembayaran belanja pegawai yang tertunda dilakukan sekaligus pada saat ADD tahap I telah disalurkan.

BAB VI
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output penggunaan ADD setiap tahap kepada Dinas melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sampai dengan tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat Bulan Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sampai dengan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat Bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan bulanan paling lambat minggu kedua bulan berikutnya kepada Dinas melalui Camat.
- (6) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah belanja pegawai dan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- (7) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian output ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Dalam hal Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan Perangkat Daerah lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat atau tim khusus yang dapat dibentuk oleh Bupati apabila dipandang perlu.
- (5) Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan ADD di wilayahnya.
- (6) Dalam hal pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Camat dibantu oleh pendamping Desa dan pendamping lokal Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 28 Pebruari 2019
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 28 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.
NIP. 19620624 198602 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
 ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN
 HUMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

PAGU ALOKASI DAN PENYALURAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
 HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2019

No	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD per Desa (Rp)	Penyaluran (Rp)	
				Tahap I (60%)	Tahap II (40%)
1	Baktiraja	Tipang	357,100,900	214,260,540	142,840,360
2	Baktiraja	Sinambela	364,225,600	218,535,360	145,690,240
3	Baktiraja	Simangulampe	352,492,100	211,495,260	140,996,840
4	Baktiraja	Marbun Tonga Marbun Dolok	352,306,600	211,383,960	140,922,640
5	Baktiraja	Siunong Unong Julu	341,075,400	204,645,240	136,430,160
6	Baktiraja	Simamora	377,754,600	226,652,760	151,101,840
7	Baktiraja	Marbun	376,937,100	226,162,260	150,774,840
8	Dolok Sanggul	Janji	379,847,300	227,908,380	151,938,920
9	Dolok Sanggul	Purba Dolok	354,506,700	212,704,020	141,802,680
10	Dolok Sanggul	Sileang	355,687,600	213,412,560	142,275,040
11	Dolok Sanggul	Lumban Tobing	360,601,700	216,361,020	144,240,680
12	Dolok Sanggul	Sosor Tambok	352,876,100	211,725,660	141,150,440
13	Dolok Sanggul	Bonanionan	349,564,100	209,738,460	139,825,640
14	Dolok Sanggul	Parik Sinomba	353,050,900	211,830,540	141,220,360
15	Dolok Sanggul	Simarigung	354,388,100	212,632,860	141,755,240
16	Dolok Sanggul	Sirisirisi	355,549,000	213,329,400	142,219,600
17	Dolok Sanggul	Matiti	349,858,600	209,915,160	139,943,440
18	Dolok Sanggul	Purba Manalu	351,836,700	211,102,020	140,734,680
19	Dolok Sanggul	Hutabagasan	431,681,100	259,008,660	172,672,440
20	Dolok Sanggul	Aek Lung	351,777,300	211,066,380	140,710,920
21	Dolok Sanggul	Sampean	346,298,500	207,779,100	138,519,400
22	Dolok Sanggul	Hutaraja	357,000,500	214,200,300	142,800,200
23	Dolok Sanggul	Simangaronsang	352,484,900	211,490,940	140,993,960
24	Dolok Sanggul	Pakkat	393,277,000	235,966,200	157,310,800
25	Dolok Sanggul	Sosor Gonting	402,531,300	241,518,780	161,012,520
26	Dolok Sanggul	Saitnihuta	359,807,700	215,884,620	143,923,080
27	Dolok Sanggul	Silaga Laga	345,813,200	207,487,920	138,325,280
28	Dolok Sanggul	Sosortolong Sihite III	343,461,900	206,077,140	137,384,760
29	Dolok Sanggul	Sihite I	342,988,800	205,793,280	137,195,520
30	Dolok Sanggul	Matiti II	349,651,100	209,790,660	139,860,440
31	Dolok Sanggul	Sihite II	346,736,400	208,041,840	138,694,560
32	Dolok Sanggul	Lumban Purba	349,389,900	209,633,940	139,755,960
33	Dolok Sanggul	Hutagurgur	355,824,700	213,494,820	142,329,880
34	Dolok Sanggul	Pasaribu	420,370,700	252,222,420	168,148,280
35	Lintong Nihuta	Sitolu Bahal	353,445,200	212,067,120	141,378,080
36	Lintong Nihuta	Bonan Dolok	365,963,600	219,578,160	146,385,440
37	Lintong Nihuta	Sigumpar	362,393,100	217,435,860	144,957,240
38	Lintong Nihuta	Nagasaribu II	393,342,900	236,005,740	157,337,160
39	Lintong Nihuta	Sibuntoan Parpea	349,379,600	209,627,760	139,751,840
40	Lintong Nihuta	Nagasaribu III	351,331,900	210,799,140	140,532,760
41	Lintong Nihuta	Nagasaribu I	355,278,400	213,167,040	142,111,360
42	Lintong Nihuta	Hutasoit II	348,337,900	209,002,740	139,335,160
43	Lintong Nihuta	Siharjulu	353,946,500	212,367,900	141,578,600
44	Lintong Nihuta	Tapian Nauli	359,200,400	215,520,240	143,680,160
45	Lintong Nihuta	Lobutua	354,265,100	212,559,060	141,706,040
46	Lintong Nihuta	Sitio II	388,473,900	233,084,340	155,389,560
47	Lintong Nihuta	Sigompul	346,297,600	207,778,560	138,519,040
48	Lintong Nihuta	Pargaulan	352,048,900	211,229,340	140,819,560
49	Lintong Nihuta	Nagasaribu V	346,149,900	207,689,940	138,459,960
50	Lintong Nihuta	Habeahan	346,094,200	207,656,520	138,437,680

No	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD per Desa (Rp)	Penyaluran (Rp)	
				Tahap I (60%)	Tahap II (40%)
51	Lintong Nihuta	Dolok Margu	357,773,900	214,664,340	143,109,560
52	Lintong Nihuta	Sibuntuon	347,260,400	208,356,240	138,904,160
53	Lintong Nihuta	Parulohan	351,501,200	210,900,720	140,600,480
54	Lintong Nihuta	Siponjot	353,248,800	211,949,280	141,299,520
55	Lintong Nihuta	Hutasoit	350,612,600	210,367,560	140,245,040
56	Lintong Nihuta	Nagasaribu IV	347,465,200	208,479,120	138,986,080
57	Onan Ganjang	Sanggaran II	370,302,300	222,181,380	148,120,920
58	Onan Ganjang	Janji Nagodang	348,247,300	208,948,380	139,298,920
59	Onan Ganjang	Sigalogo	354,165,500	212,499,300	141,666,200
60	Onan Ganjang	Batu Nagodang Siatas	358,054,300	214,832,580	143,221,720
61	Onan Ganjang	Onan Ganjang	367,701,000	220,620,600	147,080,400
62	Onan Ganjang	Aek Godang Arbaan	357,111,700	214,267,020	142,844,680
63	Onan Ganjang	Sihikit	347,872,500	208,723,500	139,149,000
64	Onan Ganjang	Parnapa	344,875,600	206,925,360	137,950,240
65	Onan Ganjang	Hutajulu	363,408,400	218,045,040	145,363,360
66	Onan Ganjang	Sibuluan	351,556,900	210,934,140	140,622,760
67	Onan Ganjang	Sampe Tua	347,044,200	208,226,520	138,817,680
68	Onan Ganjang	Parbotihan	441,293,200	264,775,920	176,517,280
69	Pakkat	Sipagabu	358,045,300	214,827,180	143,218,120
70	Pakkat	Purba Sianjur	354,414,900	212,648,940	141,765,960
71	Pakkat	Panggugunan	375,799,000	225,479,400	150,319,600
72	Pakkat	Sijarango	350,991,600	210,594,960	140,396,640
73	Pakkat	Rura Tanjung	360,896,500	216,537,900	144,358,600
74	Pakkat	Parmonangan	378,961,900	227,377,140	151,584,760
75	Pakkat	Lumban Tonga-Tonga	355,763,700	213,458,220	142,305,480
76	Pakkat	Ambobi Paranginan	379,676,600	227,805,960	151,870,640
77	Pakkat	Purba Bersatu	391,401,400	234,840,840	156,560,560
78	Pakkat	Siambaton	358,914,400	215,348,640	143,565,760
79	Pakkat	Manalu	353,878,800	212,327,280	141,551,520
80	Pakkat	Karya	365,028,600	219,017,160	146,011,440
81	Pakkat	Hauagong	344,980,800	206,988,480	137,992,320
82	Pakkat	Purba Baringin	390,707,200	234,424,320	156,282,880
83	Pakkat	Pakkat Hauagong	365,993,800	219,596,280	146,397,520
84	Pakkat	Siambaton Pahae	358,201,200	214,920,720	143,280,480
85	Pakkat	Tukka Dolok	354,717,300	212,830,380	141,886,920
86	Pakkat	Pulo Godang	354,191,900	212,515,140	141,676,760
87	Pakkat	Peadungdung	354,213,500	212,528,100	141,685,400
88	Pakkat	Rura Aek Sopang	349,634,900	209,780,940	139,853,960
89	Pakkat	Banuarea	362,171,900	217,303,140	144,868,760
90	Pakkat	Sijarango I	371,789,900	223,073,940	148,715,960
91	Paranginan	Lobutolong Habinsaran	342,007,600	205,204,560	136,803,040
92	Paranginan	Lumban Sialaman	344,941,100	206,964,660	137,976,440
93	Paranginan	Pearung	360,203,500	216,122,100	144,081,400
94	Paranginan	Paranginan Utara	350,898,800	210,539,280	140,359,520
95	Paranginan	Sihonongan	350,600,100	210,360,060	140,240,040
96	Paranginan	Pearung Silali	349,527,800	209,716,680	139,811,120
97	Paranginan	Siboru Torop	353,849,100	212,309,460	141,539,640
98	Paranginan	Lobutolong	349,871,600	209,922,960	139,948,640
99	Paranginan	Paranginan Selatan	350,805,700	210,483,420	140,322,280
100	Paranginan	Lumban Barat	433,781,200	260,268,720	173,512,480
101	Paranginan	Lumban Sianturi	356,372,200	213,823,320	142,548,880
102	Parlilitan	Sihotang Hasugian Dolok I	351,610,800	210,966,480	140,644,320
103	Parlilitan	Baringin	357,353,800	214,412,280	142,941,520
104	Parlilitan	Sihotang Hasugian Habinsaran	348,769,000	209,261,400	139,507,600
105	Parlilitan	Pusuk I	363,265,700	217,959,420	145,306,280
106	Parlilitan	Sionom Hudon Sibulbulon	356,318,400	213,791,040	142,527,360
107	Parlilitan	Sionom Hudon Selatan	359,210,100	215,526,060	143,684,040
108	Parlilitan	Sionom Hudon Julu	383,439,300	230,063,580	153,375,720
109	Parlilitan	Simataniari	354,018,600	212,411,160	141,607,440
110	Parlilitan	Sionom Hudon Runggu	352,381,200	211,428,720	140,952,480
111	Parlilitan	Sionom Hudon Tonga	355,496,700	213,298,020	142,198,680
112	Parlilitan	Janji Hutana	350,394,300	210,236,580	140,157,720
113	Parlilitan	Sihotang Hasugian Dolok II	347,529,900	208,517,940	139,011,960

No	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADD per Desa (Rp)	Penyaluran (Rp)	
				Tahap I (60%)	Tahap II (40%)
114	Parlilitan	Sionom Hudon Utara	367,646,400	220,587,840	147,058,560
115	Parlilitan	Sionom Hudon Timur II	355,597,800	213,358,680	142,239,120
116	Parlilitan	Sionom Hudon Toruan	364,285,000	218,571,000	145,714,000
117	Parlilitan	Sionom Hudon Timur	360,162,900	216,097,740	144,065,160
118	Parlilitan	Sihotang Hasugian Tonga	363,095,700	217,857,420	145,238,280
119	Parlilitan	Baringin Natam	348,674,800	209,204,880	139,469,920
120	Parlilitan	Sionom Hudon VII	460,619,800	276,371,880	184,247,920
121	Parlilitan	Pusuk II Simaninggir	391,225,600	234,735,360	156,490,240
122	Pollung	Parsingguran II	369,886,000	221,931,600	147,954,400
123	Pollung	Ria Ria	372,566,300	223,539,780	149,026,520
124	Pollung	Hutapaung	351,783,200	211,069,920	140,713,280
125	Pollung	Hutajulu	379,799,000	227,879,400	151,919,600
126	Pollung	Hutapaung Utara	358,350,100	215,010,060	143,340,040
127	Pollung	Pandumaan	375,934,500	225,560,700	150,373,800
128	Pollung	Aek Nauli II	384,987,400	230,992,440	153,994,960
129	Pollung	Pollung	358,226,100	214,935,660	143,290,440
130	Pollung	Parsingguran I	357,838,000	214,702,800	143,135,200
131	Pollung	Sipituhuta	358,456,100	215,073,660	143,382,440
132	Pollung	Pansurbatu	366,280,500	219,768,300	146,512,200
133	Pollung	Aek Nauli I	361,874,100	217,124,460	144,749,640
134	Pollung	Pardomuan	347,798,200	208,678,920	139,119,280
135	Sijamapolang	Sitapongan	354,740,900	212,844,540	141,896,360
136	Sijamapolang	Bonan Dolok I	349,438,500	209,663,100	139,775,400
137	Sijamapolang	Bonan Dolok II	353,737,000	212,242,200	141,494,800
138	Sijamapolang	Batunajagar	352,052,000	211,231,200	140,820,800
139	Sijamapolang	Sibuntuon	351,280,400	210,768,240	140,512,160
140	Sijamapolang	Sanggaran I	356,832,100	214,099,260	142,732,840
141	Sijamapolang	Sigulok	354,769,400	212,861,640	141,907,760
142	Sijamapolang	Nagurguran	347,704,100	208,622,460	139,081,640
143	Sijamapolang	Hutaginjang	351,811,500	211,086,900	140,724,600
144	Sijamapolang	Siborboron	390,893,300	234,535,980	156,357,320
145	Tarabintang	Marpadan	363,074,400	217,844,640	145,229,760
146	Tarabintang	Sitanduk	374,413,800	224,648,280	149,765,520
147	Tarabintang	Tarabintang	381,348,800	228,809,280	152,539,520
148	Tarabintang	Simbara	359,406,100	215,643,660	143,762,440
149	Tarabintang	Sihotang Hasugian Toruan	364,548,600	218,729,160	145,819,440
150	Tarabintang	Sihombu	357,060,400	214,236,240	142,824,160
151	Tarabintang	Sibongkare Sianju	354,543,800	212,726,280	141,817,520
152	Tarabintang	Mungkur	352,159,500	211,295,700	140,863,800
153	Tarabintang	Sibongkare	353,440,500	212,064,300	141,376,200
JUMLAH			55,265,562,400	3,315,9337,440	22,106,224,960

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUHUT SILABAN, S.H.
NIP. 19620624 198602 1 001

6				PEMBIAYAAN										
6	1			Penerimaan Pembiayaan										
6	1	1		Silpa Tahun Sebelumnya										
6	1	1	01	Silpa Tahun Sebelumnya										
6	2			Pengeluaran Pembiayaan										
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan										
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan										
6	2	2		Penyertaan Modal Desa										
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa										
				JUMLAH PEMBIAYAAN										
				JUMLAH										
				(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)										

<p style="text-align: center;">BENDAHARA DESA,</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>	<p style="text-align: right;">.....(Desa), ...(tanggal, bulan dan tahun)</p> <p style="text-align: right;">Disetujui oleh :</p> <p style="text-align: right;">KEPALA DESA.....,</p> <p style="text-align: right;">(.....)</p>
---	---

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.
NIP. 19620624 198602 1 001

- Kolom 5 : diisi satuan volume:
- Jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit
- Jalan/irigasi/drainase atau yang sejenis = M
- Kegiatan non fisik – paket
- Kolom 6 : diisi jumlah anggaran yang direncanakan
Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi sampai dengan saat ini
Kolom 8 : diisi satuan volume yang terealisasi sampai dengan saat ini
Kolom 9 : diisi dengan jumlah dana yang digunakan
Kolom 10 : diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan
Kolom 11 : diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa (DD)
Kolom 12 : diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa (ADD)
Kolom 13 : diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain DD dan ADD
Kolom 14 : diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.

NIP. 19620624 198602 1 001